

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah diberlakukannya otonomi daerah setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Undang-undang No.23 tahun 2014). Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bupati.

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah menurut Rasyid (2000, dalam Nugroho, 2000: 142) adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Adanya otonomi daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensinya.

Pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan angin segar serta nafas baru bagi upaya membangun dengan keterlibatan masyarakat daerah dan juga meningkatkan potensi milik daerah untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran dari masyarakat menjadi kata kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini disebabkan semangat dari otonomi daerah merupakan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga negara yang selama masa pemerintahan orde baru lebih bercorak sentralistis.

Kepala Daerah sebagai pemimpin organisasi administrasi pemerintahan daerah dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja dari bawahannya, mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menjadi kreator, inovator dan fasilitator dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah (Kaloh, 2003: 6).

Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Keberhasilan dari pembangunan nasional juga ditentukan dari keberhasilan sebuah daerah, sehingga jika kinerja dari Pemerintah Daerah buruk akan berdampak pada pemerintahan nasional, yaitu rendah atau berkurangnya kinerja efektivitas penyelenggaraan nasional. Dengan demikian, Kepala Daerah dan perangkat daerah harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan daerah.

Keberhasilan dari sebuah daerah dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain semakin berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat kesehatan Osborne dan Gabler (1992, dalam Kaloh, 2003: 6). Kepala Daerah yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah, yaitu menentukan arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah. Hal ini ditentukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya (Kaloh, 2003: 4).

Seorang Kepala Daerah selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan dan keadaan dalam memimpin organisasi administrasi daerah. Keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh Kepala Daerah antara lain bagaimana mewujudkan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab sebagai suatu paradigma baru, yang didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang prima, sumber alam dan sumber keuangan serta sarana dan prasarana yang memadai, yang mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kehidupan masyarakat melalui program dan strategi pelayanan dan pemberdayaan.

Menurut Kaloh (2003: 4) Kepala Daerah merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik pelayanan internal organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Seorang Kepala Daerah menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat dan tuntutan organisasi, merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah berlomba-lomba agar dapat membuat daerahnya maju dan masyarakatnya sejahtera, seorang Kepala Daerah harus kreatif dan inovatif sehingga roda pemerintahan yang berada di tangannya mampu untuk dikendalikan dan perangkat daerah mampu menjalankan kewajibannya. Hal yang menjadi perhatian dengan adanya otonomi daerah adalah semakin banyaknya dinasti politik dalam sebuah kepemimpinan daerah di Indonesia setelah adanya otonomi daerah.

Semenjak terjadinya pilkada di Indonesia hingga saat ini tercatat ada sembilan dinasti politik yang terjadi dan berupa pewarisan kekuasaan Kepala Daerah kepada keluarganya. Salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten Bantul, dimana jabatan Bupati yang diduduki oleh Idham Samawi yang menjabat dari tahun 1999-2010, dilanjutkan oleh istrinya Sri Suryawidati atau sering disebut Idha Samawi. Sri Surya Widati disebut-sebut sebagai alat untuk pelanggaran kekuasaan Idham Samawi di Bantul (Adninda, 2013). Akan tetapi, politik dinasti bukan menjadi fokus dari penelitian ini, tetapi lebih untuk melihat kinerja dari Bupati yang “katanya” hanya sebagai alat penerus kekuasaan. Kabupaten Bantul menjadi daerah yang memiliki daya tarik tersendiri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati perempuan yang pertama di Jogja yaitu Sri Surya Widati untuk periode 2010-2015 (Bawono, 2016).

Walaupun dianggap sebagai pelanggaran kekuasaan, namun selama 5 tahun menjabat adanya kemajuan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini berawal adanya klaim-klaim atau capaian dari Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Bupati saat akan mencalonkan diri dalam pilkada 2015 yang lalu dan juga indikator kinerja pemerintah daerah yang mencapai 100%. Berikut hasil capaian dari Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2010-2015 (KPUD, 2015 diakses 15 Oktober 2016), yaitu: (1) meningkatnya pendapatan petani; (2) menurunnya angka kemiskinan; (3) meningkatnya pertumbuhan ekonomi; (4) tingkat pendidikan meningkat; (5) indeks kepuasan masyarakat meningkat; (6) kualitas pelayanan kesehatan meningkat; (7) menguatnya kepercayaan Pemerintah Pusat dan DIY

atas prestasi pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Selain itu juga adanya pencapaian 100% indikator kinerja yang sebelumnya dirancang pada RPJMD 2011-2015 dan kemudian dilihat hasilnya di Laporan Kinerja (LKJ) Pemerintah Daerah tahun 2015, yaitu: (1) nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah meningkat dari C menjadi B; (2) nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD); (3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); (4) persentase Gizi Buruk; (5) usia harapan hidup; (6) angka melek huruf; (7) tingkat ketersediaan energi dan protein; (8) persentase peningkatan jumlah wisatawan; (9) angka pengangguran; (10) persentase desa tangguh; (11) opini pemeriksaan BPK; (12) rata-rata lama sekolah.

Capaian yang telah disebutkan di atas baik itu yang digunakan Bupati dalam pemilukada maupun hasil indikator kinerja yang mencapai 100% dilihat dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (2015) berasal dari level elit, namun di sini belum diketahui bagaimana tanggapan atau persepsi dari masyarakat terkait capaian tersebut, karena bagaimanapun meningkat menurut elit belum tentu meningkat bagi masyarakat, sehingga diperlukannya pembuktian dari capaian-capaian tersebut berdasarkan pandangan masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan pula perihal tanggapan masyarakat terkait kinerja Pemerintah Daerah.

Alasan mengambil Kabupaten Bantul karena: (1) Bupati Bantul merupakan Bupati perempuan pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) belum adanya penelitian terkait kinerja Bupati Bantul. (2) kepemimpinan Sri Surya Widati dikatakan sebagai pelanggaran kekuasaan dari suaminya (Idham Samawi),

sehingga penting untuk diketahui kemampuan dalam memimpin dan bagaimana kinerjanya; (3) menurut pemerintah daerah, tingkat pendidikan di Bantul mengalami peningkatan. Akan tetapi, angka melek huruf di Bantul berada diposisi ke-5 setelah Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantul, dan Gunung Kidul, sehingga perlunya persepsi masyarakat terkait pendidikan; (4) usia harapan hidup (UHH) di Bantul berada diposisi terendah setelah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Bantul. Usia harapan hidup ini berkaitan erat dengan kesehatan, keadaan pangan, dan kondisi perekonomian.

Sementara itu, alasan mengambil di Kecamatan Kretek: (1) secara geografis kecamatan ini berada di pinggiran Kabupaten Bantul dan masuk dalam kawasan pantai Selatan. Walaupun berada di pinggir Kabupaten Bantul tetapi kecamatan ini tidak memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kota, sehingga Bupati bisa dengan mudah meninjau ke kecamatan tersebut. Peninjauan ini tentunya berkaitan dengan dedikasi (pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran) Bupati.

Hal ini berkaitan dengan selama 5 tahun kepemimpinannya pernah atau tidak berkunjung ke kecamatan, untuk sekedar menjaring aspirasi masyarakat, melihat keadaan langsung di lapangan, karena seorang Bupati turun ke daerah itu cukup penting dan bisa menghasilkan dampak yang luas biasa. Inspeksi dadakan yang dilakukan seorang Bupati akan membuat perangkat daerah menjadi lebih disiplin dalam bekerja; (2) Kecamatan Kretek merupakan daerah dengan tempat wisata yang cukup banyak dan digemari pengunjung. Selain itu juga adanya peningkatan presentase jumlah wisatawan jika dilihat dari LKJ Pemerintah

Daerah, sehingga adanya pariwisata tersebut apakah mendatangkan dampak yang positif bagi masyarakat dan mampu meningkatkan taraf hidup serta mensejahterakan masyarakat sekitarnya, dan membuat pembangunan di kecamatan tersebut maju dengan pesat atau tidak; (4) Kretek merupakan kecamatan dengan keunggulan pariwisatanya, namun dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul presentase jiwa miskin di kecamatan ini berada di posisi 3 terbawah setelah Pajangan dan Banguntapan (Laporan Kinerja Pemerintah, 2015), sehingga penting diketahui adanya kemajuan sektor pariwisata mampu mendatangkan dampak positif ke masyarakat atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dilihat dari Misi Bupati, capaian atau klaim dari Pemerintah Daerah yang kemudian digunakan oleh Bupati saat mencalonkan diri dalam pilkada 2015, serta melihat kesesuaian capaian 100% dari indikator kinerja Pemerintah Daerah yang sebelumnya dilihat dalam LKJ (2015) dengan yang terjadi atau dialami oleh masyarakat. Akan tetapi penggunaan misi Bupati, capaian, dan capaian 100% indikator kinerja tidak digunakan keseluruhan melainkan hanya mengambil yang *relevan* dengan keadaan di lokasi penelitian.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Kretek terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati tahun 2010-2015?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Kretek terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati tahun 2010-2015.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat untuk sisi keilmuan diharapkan memperkaya *literature* yang mengkaji masalah persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- 2) Menjadi referensi selanjutnya terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Bupati dan perangkat daerahnya;
- 2) Dapat memberikan hasil atau manfaat dalam usaha meningkatkan serta mengembangkan kualitas agar menghasilkan kinerja yang lebih baik dari Pemerintah Daerah dan juga Bupati yang sedang menjabat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan rangkuman atau ulasan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan sekarang. Kajian pustaka perlu dilakukan dengan tujuan untuk

menghimpun berbagai informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kajian pustaka yang pertama adalah penelitian Sri Puji Nurhaya yang ditulis di tahun 2009 dengan judul “Kinerja Lembaga Legislatif (Studi: Analisis Kinerja DPRD Kota Medan Periode 2004-2009)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab lemahnya kinerja DPRD Kota Medan dalam aspek Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang kinerja dari pejabat pemerintah yang bertugas untuk melayani segala kebutuhan dari masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah indikator yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga aspek yaitu Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas, serta tidak adanya pelibatan masyarakat sebagai penilai dari kinerjanya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori parlemen, teori perwakilan politik, dan kinerja lembaga DPRD.

- b. Kajian pustaka yang kedua adalah artikel yang ditulis oleh Dewi Novita Sari pada tahun 2014 dengan judul “Persepsi Masyarakat Randukuning terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa”. Penelitian ini dilakukan karena masih banyaknya aparatur desa yang belum maksimal kinerjanya dan belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang kinerja dari pejabat pemerintah serta melibatkan masyarakat sebagai penilai kinerjanya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini juga melibatkan Kepala Desa sebagai informan,

sehingga penelitian ini tidak hanya fokus terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa namun pemerintah desa juga ikut dilibatkan walaupun apa yang dijelaskan dari aparatur desa tidak dapat spesifik membahas kinerjanya. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu tidak adanya tolak ukur atau indikator untuk mengukur kinerja yang dilakukan itu baik apa tidaknya, karena sebuah indikator dalam sebuah penelitian berguna sebagai pembatas hal-hal apa saja yang harus dibahas dan menjadi fokus penelitiannya. Teori yang digunakan adalah teori persepsi dan kinerja aparatur pemerintah desa. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

- c. Kajian pustaka yang ketiga adalah penelitian Dwi Lucita Sari yang ditulis tahun 2016 dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara”. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap hasil kinerja dari sisi pelayanan reguler yang dilakukan oleh aparatur Desa Bumi Agung Marga. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya pelibatan masyarakat sebagai penilai kinerjanya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi indikator penilaiannya. Indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah indikator harapan, pengetahuan serta tanggapan masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Sehingga penelitian ini hanya fokus terhadap kinerja aparatur desa dari segi pelayanan

publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persepsi, masyarakat, kinerja, aparatur desa, dan pelayanan publik.

- d. Kajian Pustaka yang keempat adalah artikel yang ditulis oleh Skivo Somba (2011) dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Lurah di Kelurahan Aertembaga Kota Bitung”. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan persepsi masyarakat terhadap kinerja dari Lurah dan pegawai kelurahan. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya pelibatan masyarakat sebagai penilai kinerja. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi pengukuran kinerjanya. Penelitian ini mengukur kinerja dari segi kecakapan, pembagian kerja, impersonalitas hubungan, ketepatan waktu, dan kemampuan melaksanakan tugas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Teori yang digunakan adalah teori persepsi, masyarakat dan kinerja.

Tabel 1.1 : Kajian pustaka

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Sri Puji Nurhaya	Kinerja Lembaga Legislatif (Studi Analisis Kinerja DPRD Kota Medan Periode 2004-2009)	Berdasarkan hasil dari penelitiannya, anggota DPRD Kota Medan belum menunjukkan kinerja yang optimal dan berkualitas. Dilihat dari segi akuntabilitas anggota DPRD cenderung memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya, dan sebagai pembuat kebijakan belum mampu menjawab persoalan yang ada dan tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dibuat berasal dari Eksekutif yang notabene mencari PAD dan kebijakan yang dimaksud terkadang memberatkan masyarakat. Dari sisi responsivitas DPRD Kota Medan sudah memiliki wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat namun hal itu belum diimbangi tindak lanjut untuk menindaklanjuti setiap aspirasi dan tuntutan dari masyarakat. Sedangkan dari segi keefektifan DPRD masih rendahnya tindakan atau kebijakan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya, khususnya dalam fungsi legislasi dan pengawasan yaitu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, karena DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Namun setiap peraturan yang ada hanya inisiatif dari Eksekutif dan DPRD hanya melakukan pembahasan kemudian

			memberikan persetujuan.
2	Dewi Novita Sari	Persepsi Masyarakat Randukuning terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	Hasil dari penelitian ini adalah perlu ditingkatkannya kinerja dari aparatur desa Randukuning dan perlu adanya pemantapan kerja. Aparatur Desa Randukuning harus semakin maju dan perlu peningkatan mutu kerja agar desa maupun masyarakat desa semakin maju dan berkembang. Dengan adanya penelitian ini dan setelah mendapat masukan dari masyarakat diharapkan akan lebih memotivasi aparatur Desa Randukuning Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk lebih maju dan berkembang, serta loyal terhadap desa dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.
3	Dwi Lucita Sari	Persepsi masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari segi pelayanan reguler seperti pembuatan kartu keluarga dan pembuatan kartu tanda penduduk prosesnya sangat lama, hal ini menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kinerja dari aparatur desa yang cenderung membuang-buang waktu. Selain itu dari segi ketepatan, kelengkapan dan kerapihan aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya belum berjalan sesuai dengan peraturan, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini belum sesuai dengan prosedur yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki harapan agar aparatur desa dapat memperbaiki kinerjanya dalam segi kuantitas dan kualitas guna meningkatkan pelayanan publik.

			Untuk itu, aparaturnya harus memperbaiki cara kerja, merubah budaya kerja, dan memiliki kualitas kinerja yang baik serta tanggung jawab akan hak dan kewajibannya.
4	Skivo Somba	Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Lurah di Kelurahan Aertembaga Kota Bitung	Hasil penelitian ini adalah dilihat dari segi kecakapan kinerja dari pegawai kelurahan telah sesuai dengan harapan masyarakat dan masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan, segi pembagian kerja masyarakat tidak merasa kesulitan saat berurusan dengan Lurah dan pegawainya karena telah memiliki kemampuan dan keterampilan. Sementara itu, dalam hal impersonalitas hubungan pelayanan yang diberikan baik dan tidak membedakan perlakuan ke masyarakat seperti kepada masyarakat yang kaya dan memiliki jabatan lebih diutamakan. Dalam segi ketepatan waktu pelayanan yang diberikan cepat dan lancar serta tidak dipersulit. Segi kemampuan melaksanakan tugas, faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pelayanan adalah faktor kenyamana. Untuk kenyamanan di kantor kelurahan cukup dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dengan fasilitas yang disediakan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak enggan jika berurusan dengan kelurahan.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori diharapkan menjadi acuan secara konsep yang nantinya dapat digunakan dalam memandang, menilai dan menganalisis sebuah permasalahan sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan, dengan demikian teori berfungsi sebagai landasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori persepsi dan teori kinerja Kepala Daerah.

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Kata “Persepsi” sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, mengenai tanggapan terhadap suatu informasi ataupun peristiwa yang didengar atau dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Berikut pengertian persepsi menurut para ahli:

Menurut Kreitner (2003: 208) (dalam Adi, 1994: 105) persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan kita dapat menafsirkan dan memahami lingkungan sekitar kita. Persepsi akan timbul setelah seseorang atau sekelompok manusia terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek dan setelah dirasakan akan menginterpretasikan objek yang dirasakan tersebut, seperti pendapat Kimball Young “Persepsi merupakan suatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan, memahami objek fisik maupun sosial, cara pandang, pendapat, dan opini mengenai kejadian yang sedang dan telah terjadi (Walgito, 2003: 89).

Sebuah persepsi akan timbul ketika masyarakat melakukan pengamatan serta mendengar secara langsung maupun tidak langsung. Persepsi yang timbul bisa bersifat positif ataupun negatif, hal itu tergantung cara pandang dari masyarakat itu sendiri. Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Kretek mereka akan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap kinerja pemerintah daerah pada masa kepemimpinan Sri Surya Widati tahun 2010-2015.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah tidak akan timbul tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Walgito (2003: 53) terdapat dua faktor yang berpengaruh pada persepsi yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah apa yang ada di dalam diri individu akan mempengaruhinya dalam mengadakan persepsi. Diri orang yang bersangkutan juga termasuk faktor internal, karena berasal dari individu itu sendiri tanpa dipengaruhi orang lain dan lingkungannya, faktor internal diperoleh berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, jabatan, pengalaman, kepribadian dan pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud adalah dari lingkungan dimana persepsi itu berlangsung.

Faktor eksternal juga dapat berasal dari lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, serta berasal dari orang-orang terdekat (pertemanan) yang kemudian diikuti oleh individu tersebut. Selain itu juga berita yang berkembang juga sangat berpengaruh dalam memberikan persepsi. Faktor - faktor inilah yang kemudian menghasilkan persepsi yang berbeda walaupun

dengan kasus yang sama, karena persepsi yang timbul tidak hanya berasal dari lingkungan namun juga berasal dari diri individu itu sendiri.

Menurut Adi (1994: 114), ketika membicarakan persepsi maka ada beberapa hal yang penting, yakni:

1) *Impression Formation*

Proses dimana informasi tentang orang lain diubah menjadi pengetahuan atau pemikiran yang relatif menyerap orang tersebut. Hal ini terbentuk melalui:

- a) Pengkategorian (klasifikasi)
- b) Mempertimbangkan atau kombinasi segi positif dan negatif
- c) Praduga

2) *Social Influence*

Kehadiran orang lain mempengaruhi tingkat laku dan persepsi seseorang. Bentuk tingkah laku dan persepsi dapat terbentuk karena imitasi atau peniruan. Sebagai halnya, karena kedekatan antara individu satu dengan yang lainnya secara tidak langsung dapat menyebabkan salah satu dari mereka mengikuti rekannya.

3) *Social Relationship*

Suatu persepsi sosial banyak dipengaruhi oleh keakrabannya dengan orang lain, salah satunya dipengaruhi karena kesamaan sikap. Dalam memberikan tanggapan tidak jarang seseorang mengikuti apa yang diyakini orang lain dengan dasar “katanya”.

Faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi seseorang, menurut Robbin (dalam Hanurawan, 2010: 37) adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penerima

Hal yang menjadi karakteristik kepribadian utama itu adalah konsep diri, nilai dan sikap, pengalaman di masa lampau dan harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya. Pengalaman di masa lalu sebagai bagian dasar informasi juga menentukan pembentukan persepsi seseorang. Faktor penerima sangat penting karena masyarakat akan mengingat bagaimana mereka dahulu menentukan pilihan Kepala Daerah, sehingga faktor inilah yang kemudian mempengaruhinya untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dalam hal ini persepsi terhadap Kepala Daerah faktor penerima menjadi penentu setiap individu, karena mereka cenderung untuk menilai apa yang memang dirasakan dan diterima oleh masyarakat, baik berupa persepsi positif maupun negatif.

b. Faktor Objek

Persepsi sosial secara khusus, objek yang diamati adalah orang lain. Beberapa ciri yang terdapat dalam diri objek sangat memungkinkan untuk dapat memberi pengaruh yang menentukan terhadap terbentuknya persepsi sosial. Persepsi yang dihasilkan berdasarkan fakta yang terdapat dalam objek tersebut, dalam hal ini adalah kinerja dari Pemerintah Daerah. Maksudnya adalah seorang individu akan dapat menilai ketika sudah jelas

dan melihat apa yang harus dinilainya, karena penilaian dilakukan berdasarkan objeknya.

Teori persepsi ini digunakan dalam penelitian ini karena berguna untuk mengetahui bagaimana cara pandang individu terhadap sebuah objek. Serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam memberikan persepsinya, dan hal ini berguna dalam melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu juga indikator kinerja Saat melakukan penilaian berdasarkan indikator kinerja, akan diketahui masyarakat melakukan penilaian berdasarkan diri sendiri atau karena faktor lingkungan yang ikut mempengaruhi. Hal ini dapat diketahui saat melakukan wawancara langsung dengan masyarakat.

2. Kinerja Kepala Daerah

a. Kinerja

1) Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran pokok mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu Mahsun (dalam Mutiarin dan Zaenuddin, 2014: 77)

Pendapat lain diungkapkan oleh Prawirosentono (dalam Sutrisno, 2010: 170) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Selain itu, menurut Widodo (dalam Mukarom, 2016: 52) menyatakan kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Miner (1990, dalam Sutrisno, 2010: 170) kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.

Menurut Cormick dan Tiffin (1980, dalam Sutrisno, 2010: 170) mengemukakan kinerja adalah kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seseorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas adalah bagaimana seseorang dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengenai banyaknya kesalahan yang dibuat, kedisiplinan dan ketepatan. Waktu kerja adalah mengenai jumlah absen yang dilakukan, keterlambatan dan lamanya masa kerja dalam tahun yang dijalankan.

Bagi setiap organisasi maupun individu, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana

tujuannya dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu. Seperti halnya kinerja dari seorang Bupati.

2) Pengukuran Kinerja

Setiap kinerja dari sebuah organisasi maupun individu dapat diukur menggunakan indikator dan faktor-faktor tertentu. Menurut Dwiyanto (2012: 50-51) terdapat 5 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja:

a) Produktivitas

Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting (Dwiyanto, 2012: 50).

b) Kualitas Layanan

Kualitas layanan sangat penting dalam menjelaskan kinerja dari organisasi publik. Banyak pandangan negatif muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan

utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat dapat diperoleh dengan mudah, sehingga kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik (Dwiyanto, 2012: 50).

c) Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksielarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula (Dwiyanto, 2012: 50-51)

Responsivitas secara sederhananya adalah mendengarkan saran. Sehingga adanya komunikasi dalam bentuk aspirasi, guna mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Setiap kebijakan atau program yang

hendak dijalankan harus melalui persetujuan masyarakat, karena yang akan mendapat dampak signifikan terhadap kebijakan dan program tersebut adalah masyarakat. Seorang Kepala Daerah dituntut untuk tanggap terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan harus merespon dengan cepat agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat segera terealisasikan.

d) **Responsibilitas**

Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas (Dwiyanto, 2012: 51).

e) **Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian

terget. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Dwiyanto, 2012: 51).

Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan tersebut dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Setiap pemegang jabatan dalam hal ini Kepala Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang akan atau telah ditempuh kepada masyarakat. Hal itu sebagai konsekuensi karena terpilih berdasarkan suara rakyat, sehingga adanya timbal balik antara rakyat dan Kepala Daerah.

Berdasarkan 5 aspek di atas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 aspek yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Alasan tidak menggunakan aspek responsibilitas karena misi yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada yang masuk dalam aspek tersebut.

Pengukuran dari 4 aspek tersebut menggunakan misi Bupati, indikator kinerja dalam LKJ 2015 dan, capaian dari Pemerintah Daerah. Alasan menggunakan misi Bupati, indikator kinerja dalam LKJ 2015 dan, capaian dari pemerintah daerah sebagai alat ukurnya karena 3 hal ini saling berkaitan dan juga merupakan titik tolak dari kinerjanya, sehingga penilaian yang digunakan atau standar penilaiannya dapat dilihat dengan jelas. Jika berbicara kinerja Pemerintah Daerah dan juga Kepala Daerah tentunya melihat misi, indikator kinerja dan juga pencapaian daerah selama masa kepemimpinan Kepala Daerah tersebut.

Keberhasilan atau kegagalan sebuah kinerja dilihat dengan mampu atau tidak sebuah misi terealisasi, dan juga hasil dari indikator kinerjanya. Misi

yang digunakan dalam aspek Produktivitas adalah efektifitas dan efesiensi birokrasi.

Misi, indikator kinerja dan, capaian yang masuk dalam kualitas layanan adalah terkait kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dan kualitas pelayanan dalam kinerja pemerintah menurut LKJ Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 100%. Dalam hal kualitas yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tidak hanya di lihat dari jasa yang diberikan tetapi juga produk (fisik). Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Dwiyanto (2012: 50) jika kualitas layanan digunakan sebagai indikator kinerja untuk mengukur kepuasan masyarakat.

Sementara itu, responsivitas dalam hal ini mengenal dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga misi, indikator kinerja dan, capaian yang masuk dalam aspek responsivitas adalah kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi, kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan pangan di daerah, kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, jaminan kesehatan, tingkat pengangguran, kesejahteraan bagi masyarakat miskin, sarana dan prasarana publik dalam penanggulangan bencana. Alasan misi ini masuk dalam responsivitas karena jika pemerintah mampu untuk merespon dan mengenal apa kebutuhan dari masyarakat maka akan dapat dilihat dengan jelas hasilnya.

Contohnya saja apabila pemerintah Bantul dapat menurunkan angka pengangguran itu berarti mampu merespon apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, contoh lainnya adalah kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ekonomi (jalan, jembatan, pasar) dengan adanya pembangunan dalam sektor

tersebut maka pemerintah dapat dikatakan peka dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Dalam hal sarana dan prasarana penanggulangan bencana jika pemerintah dapat menangani dan memberikan fasilitas saat terjadi bencana maka itu juga dikatakan mampu merespon kebutuhan masyarakat. Inti dari aspek responsivitas adalah bisa atau tidak pemerintah dalam mengenal apa yang masyarakat butuhkan, jika pemerintah dapat merespon hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan di sektor tersebut.

Misi, indikator kinerja dan capaian yang masuk dalam aspek akuntabilitas adalah pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, transparansi pelayanan, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dalam hal keuangan dan pelayanan. Alasannya adalah untuk melihat sejauhmana pemerintah Bantul mampu untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat diberikan akses dalam hal menyalurkan aspirasi atau setidaknya masyarakat tahu tentang peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah. Bagaimanapun masyarakat berhak untuk tahu karena mereka adalah pihak yang akan mendapatkan dampaknya langsung.

Dalam hal akuntabilitas berkaitan dengan transparansi, dan dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi, sehingga transparansi keuangan maupun pelayanan merupakan adalah dua hal yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini karena masyarakat adalah

yang memegang kekuasaan tertinggi, dan setiap kebijakan yang dibuat juga berkaitan dengan masyarakat.

Teori kinerja yang ada dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur dan melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penilaian masyarakat saat memberikan persepsinya terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga adanya tolak ukur penilaian yang jelas. Hal ini berguna untuk memberi pembatasan mengenai penilaian apa saja yang harus dinilai dan apa yang tidak dinilai oleh masyarakat.

b. Kepala Daerah

1) Pengertian Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Kaloh, 2003: 2). Istilah Kepala Daerah sejak awal Kemerdekaan, khususnya dalam pengaturan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah selalu mengandung arti Kepala Daerah Otonom, yakni penjabaran asas desentralisasi, yang berlaku pada tingkat Kabupaten dan Kota.

Kepala Daerah dalam memutar roda organisasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta dalam menghadapi konflik, gejolak dan permasalahan pemerintahan di daerah, secara terus menerus dihadapkan pada berbagai tuntutan dan tantangan baik secara internal maupun eksternal, yang harus direspon dan diantisipasi, sekaligus merupakan ujian terhadap kapabilitas dan kompetensi Kepala Daerah (Kaloh, 2003: 3).

Berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah, seorang Kepala Daerah memiliki peranan yang strategis karena merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional, sebab pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional (Kaloh, 2003: 4).

Keberhasilan dari pembangunan nasional juga ditentukan dari keberhasilan sebuah daerah, sehingga jika kinerja dari pemerintah daerah buruk akan berdampak pada pemerintahan nasional, yaitu rendah atau berkurangnya kinerja efektivitas penyelenggaraan nasional. Kepala Daerah yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah, yaitu menentukan arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah. Hal ini ditentukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya.

Seorang Kepala Daerah merupakan komponen strategis dalam mengupayakan pelayanan yang berkualitas, baik pelayanan internal maupun eksternal kepada masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah yang menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi dan mewujudkan keinginan aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat dan tuntutan organisasi, merupakan kekuatan dan upaya mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat (Kaloh, 2003: 4)

Karakteristik dari Kepala Daerah adalah tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi pemerintahan maupun masyarakat, serta memberikan jawaban dan tanggapan terhadap kritik, saran dan pengawasan yang dilakukan

oleh masyarakat, serta tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat. Seorang pemimpin harus tanggap dan memberikan perhatian untuk keberlangsungan kehidupan organisasi pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya seorang Kepala Daerah memiliki tantangan yang dihadapi, yaitu mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, yang didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sumber alam, keuangan, dan sarana prasarana yang mampu meningkatkan dan mengembangkan kehidupan masyarakat melalui program, strategi pelayanan dan pemberdayaan (Kaloh, 2003: 6).

Menurut Osborne dan Gabler (1992) (dalam Kaloh, 2003: 6) pemerintah daerah dituntut untuk memahami dan memusatkan perhatian pada keluaran (*output*) yang efisien dan bukan kepada masukan (kenaikan anggaran per tahun) yang dapat mengarah pada maksimalisasi masukan (*input*) dibandingkan memaksimalkan keluaran (*output*). Pemerintah hendaknya berperilaku seperti dunia perusahaan yang melihat masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani sebaik mungkin. Keberhasilan dari pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain semakin berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat kesehatan.

Konsep di atas berguna untuk melihat bagaimana perilaku dan kinerja dari seorang Kepala Daerah. Konsep tersebut sangat penting untuk diterapkan oleh seorang Kepala Daerah. Hal ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang dihasilkan oleh Kepala Daerah itu sendiri.

2) Tugas dan Kewajiban Kepala Daerah

Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi ikut ditentukan oleh kemampuan Kepala Daerah dalam membimbing, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi ke arah pencapaian tujuan. Tugas dan fungsi Kepala Daerah bersifat universal karena selalu dilakukan oleh setiap pemimpin organisasi, yaitu mengambil kebijaksanaan organisasi, menentukan arah dan pelaksanaan kebijaksanaan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, mengevaluasi tujuan organisasi dengan mengantisipasi perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mengkoordinasikan unit-unit kerja dan mengambil keputusan Tjokroaminoto (1974, dalam Kaloh, 2003: 46)

Menurut Kaloh (2003: 46) terdapat 2 (dua) kriteria tugas dan kewajiban Kepala Daerah:

a) Tugas Administrasi

Tugas administrasi merupakan tugas yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan, dan mengendalikan serta mengawasi jalannya organisasi ke arah pencapaian tujuan. Tugas tersebut meliputi: koordinasi atas kegiatan instansi-instansi vertikal dengan Dinas/ Badan/ Kantor daerah; mengusahakan terus-menerus agar semua peraturan perundangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi pemerintah serta pejabat-pejabat yang telah diberi tugas.

Sedangkan kewajiban sebagai kepala daerah yaitu: mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, menghormati kedaulatan rakyat, menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan sebagai Peraturan Daerah bersama DPRD.

b) Tugas Manajer Publik

Sebagai manajer publik, Kepala Daerah mempunyai tugas menggerakkan partisipasi masyarakat, membimbing dan membina kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam pembangunan. Secara operasional tugas tersebut berbentuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan; serta menyelenggarakan pemerintahan umum setiap menerima tamu dari berbagai lapisan masyarakat; mengunjungi masyarakat daerah wilayahnya; menjadi penasehat; pembina dan ketua kehormatan dari berbagai organisasi; menampung; menjelaskan masalah, pengaduan dan sebagainya dari masyarakat (Pamudji dalam Kaloh, 2003: 48). Disamping itu juga sebagai sesepuh, pamong dan pengayom/ pelindung warga masyarakat di daerahnya; menjaga keselarasan dan keseimbangan kepentingan antara seluruh lapisan masyarakat dan golongan di daerahnya (Syarifuddin dalam Kaloh, 2003: 48).

Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kepala Daerah merupakan sebuah tingkat pencapaian, hasil kerja yang

dihasilkan oleh seorang Kepala Daerah bersama perangkat daerah (pemerintah daerah) dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam rencana kerjanya. Setiap hasil kerja yang dilakukan oleh Kepala Daerah selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Walaupun demikian tanggapan masyarakat akan beraneka ragam karena cara pandang setiap individu itu berbeda-beda berdasarkan indikator dan juga faktor yang mempengaruhi.

Indikator yang akan digunakan sebagai Operasional kemudian diturunkan menjadi pertanyaan/ pernyataan di penelitian ini berdasarkan dari Misi Bupati Bantul tahun 2010-2015, capaian atau klaim yang digunakan oleh Bupati saat pilukada tahun 2015, dan juga capaian dari indikator kinerja yang mencapai 100% berdasarkan laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2015. Alasan menggunakan misi, capaian atau klaim yang digunakan oleh Bupati saat pilukada tahun 2015, dan juga capaian dari indikator kinerja yang mencapai 100% berdasarkan laporan kinerja pemerintah daerah adalah ketiga hal tersebut mencerminkan kinerja dari pemerintah daerah dan juga Kepala Daerah, sehingga tolak ukur yang digunakan itu sudah jelas. Maksudnya adalah masyarakat dapat menilai berdasarkan misi selama 5 tahun itu dianggap berjalan atau tidak, selain itu juga capaian pemerintah daerah dan juga indikator kinerja yang mencapai 100% berdasarkan LKJ 2015 apakah benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.

Misi yang digunakan yaitu misi Bupati dari 1 hingga 4, sedangkan terkait capaian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan klaim yang digunakan Bupati saat mencalonkan diri dalam pilukada. Sementara itu,

indikator kinerja yang mencapai 100% menurut LKJ juga digunakan sebagai pertanyaan dalam penelitian ini. Akan tetapi pertanyaan yang digunakan atau yang dipilih berdasarkan 3 hal tersebut memperhatikan kesesuaian dengan keadaan lokasi penelitian.

Alasan penggunaan Misi yaitu agar dapat melihat dengan jelas kinerja Bupati selama 5 tahun menjabat, yakni apakah mampu menjalankan misi yang telah dibuatnya. Misi yang digunakan adalah misi yang *relevan* untuk dapat digunakan sebagai indikator penelitian. Seperti halnya dalam Misi ke 4 penulis hanya mengambil 1 indikator yaitu terkait kualitas sarana dan prasarana publik. Hal ini disebabkan karena kualitas sarana dan prasarana publik merupakan indikator yang paling tepat ditanyakan kepada masyarakat mengingat kualitas sarana dan prasarana publik yang dimaksud berhubungan dengan penanggulangan bencana alam, dan juga sesuai dengan hasil dari LKJ yang mencapai 100% dalam hal desa tangguh bencana.

Selain misi ke-4, misi pertama yang digunakan adalah meningkatkan transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi, dedikasi (pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran) dari Bupati Bantul, dan peningkatan kualitas pelayanan dalam kinerja pemerintahan daerah, karena berdasarkan LKJ 2015 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam hal pelayanan publik sudah mencapai 100%. Misi ke 2 yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, misi ini juga sesuai dengan capaian Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan mengalami peningkatan (KPUD, 2015 diakses 15 Oktober

2016). Misi ke-3 adalah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan ketahanan pangan di daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan misi tersebut juga sesuai dengan capaian dan juga indikator kinerja yang mencapai 100% dalam LKJ (2015), yaitu: angka melek huruf, tingkat ketersediaan energi dan protein, persentase peningkatan jumlah wisatawan, angka pengangguran, rata-rata lama sekolah, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan meningkat.

Misi, capaian dan indikator kinerja yang ada dalam LKJ yang telah dijelaskan tersebut digunakan sebagai acuan dalam hal melihat kinerja dari Pemerintah Daerah dan juga Bupati, serta untuk *cross check* kebenaran dari capaian Pemerintah Daerah dan juga indikator kinerja yang mencapai 100% berdasarkan LKJ (2015). Dengan demikian, masyarakat dapat dengan jelas memberikan penilaian terkait dengan kinerja pemerintah daerah dan juga Bupati Bantul tahun 2010-2015.

F. Definisi Konseptual

Berdasarkan teori-teori dari para ahli yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya teori tersebut di buat secara general sebagai berikut:

1. Persepsi

Teori terkait persepsi yang dikemukakan oleh ahli yang sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu menurut Young (dalam Walgito,2003:89), Walgito (2003:53), Adi (1994:105 dan 114), dan Robbin (dalam Hanurawan, 2010:37). Persepsi adalah sebuah proses untuk dapat memahami lingkungan sekitar, menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan, memahami objek fisik maupun sosial, cara pandang, pendapat, dan opini mengenai kejadian yang sedang dan telah terjadi.

Dalam memberikan sebuah persepsi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri berupa faktor penerima yaitu konsep diri, nilai, sikap, dan pengalaman di masa lampau. Faktor internal ini diperoleh melalui tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman, kepribadian, dan pengetahuan. Sementara itu, faktor eksternal dipengaruhi oleh 2 hal yaitu orang lain dan lingkungannya. Pengaruh orang lain diperoleh melalui *social relationship*, *sosial influence* dan *impression formation* dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang diperoleh dalam segi positif dan negatif. Sementara itu, pengaruh lingkungan diperoleh melalui lingkungan tempat tinggal, jalinan pertemanan dan tempat kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini penting digunakan untuk melihat masyarakat dalam memberikan persepsi terhadap kinerja Pemerintah

Daerah dan Bupati, dengan demikian penilaian berdasarkan diri sendiri atau adanya pengaruh dari lingkungan. Hal ini akan diperoleh saat melakukan wawancara.

2. Kinerja Kepala Daerah

Teori terkait kinerja kepala daerah yang dikemukakan oleh ahli yang sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu menurut Mahsun (dalam Mutiarin dan Zaenuddi, 2014:77), Prawirosentono (dalam Sutrisno, 2010:170), Dwiyanto (2012: 50-51), dan Bastian (dalam Tangklisan, 2005: 173). Kinerja Kepala Daerah adalah gambaran pokok mengenai tingkat pencapaian dari seorang individu maupun kelompok dalam pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah (Bupati).

Kinerja Kepala Daerah adalah tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan/ program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang ada dalam rencana strategi suatu organisasi / lembaga. Hasil kerja yang dicapai oleh seorang Kepala Daerah selama masa jabatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan hasil yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dalam penelitian ini ada 4 (empat) aspek yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Produktivitas diukur berdasarkan efektifitas, efesiensi, dan dedikasi (pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran). Kualitas layanan diukur berdasarkan kualitas pelayanan kinerja pemerintah, dan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Sementara

itu, responsivitas diukur berdasarkan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, jaminan kesehatan, pengangguran, kesejahteraan masyarakat miskin, dan sarana dan prasarana publik penanggulangan bencana. Akuntabilitas diukur berdasarkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah, transparansi dalam pelayanan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

G. Definisi Operasional

1. Persepsi

Faktor yang mempengaruhi persepsi

a. Faktor internal (dari dalam diri sendiri)

- 1) Tingkat pendidikan;
- 2) Pekerjaan (mata pencaharian);
- 3) Pengalaman;
- 4) Kepribadian;
- 5) Pengetahuan.

b. Faktor eksternal (dari luar)

- 1) Lingkungan tempat tinggal;
- 2) Lingkungan kerja;
- 3) Pertemanan.

2. Kinerja Kepala Daerah

a. Produktifitas

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi
- 2) Dedikasi (Pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran) Bupati

b. Kualitas Layanan

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan dalam kinerja pemerintahan
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

c. Responsivitas

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
- 4) Meningkatkan ketahanan pangan di daerah
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata
- 6) Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
- 7) Menurunkan tingkat pengangguran
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
- 9) Meningkatkan sarana dan prasarana publik penanggulangan bencana

d. Akuntabilitas

- 1) Kemampuan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
- 3) Transparansi dalam pelayanan

4) Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk menyelesaikan masalah ilmu ataupun praktis (Mikkelsen, 1999: 313).

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002: 3) mendefinisikan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalian data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk memperoleh makna baru dari dalam bentuk kategori-kategori jawaban, penelitian wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah (Salim, 2006: 4).

Sementara itu, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Noor, 2011: 38). Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada angka yang dapat menghasilkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mendapatkan

informasi lebih akurat dari responden terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja Bupati Bantul tahun 2010-2015.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul, khususnya di Kecamatan Kretek yang terdiri dari 5 Desa yaitu Donotirto, Parangtritis, Tirtosari, Tirtomulyo, dan Tirtohargo.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Usman, 2008: 42). Tujuan dari diadakannya populasi agar dapat mendapatkan besarnya jumlah sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 23.523 orang yang tersebar di Kecamatan Kretek.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling (Usman, 2008: 43). Teknik sampling adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam

populasi (Hasan, 2015: 85). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsional sampling. Proporsional sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan atau memperhitungkan sub-sub populasi yang akan diteliti (Hadi, 1993: 228).

Dalam menentukan besarnya sampel menggunakan rumus Slovin. Cara menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut (Noor, 2011: 158) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Anggota populasi, dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Kecamatan Kretek

e = Tingkat kesalahan 10% (0,1) dengan tingkat kepercayaan 90%

Berdasarkan rumus di atas maka dapat dihitung jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{23.523}{1+23.523.(0,1)^2}$$

n = 99,6 maka dibulatkan menjadi 100

Setelah diketahui jumlah sampel dari populasi, selanjutnya jumlah sampel tersebut dibagi secara proporsional ke dalam tiap kelompok sampel. Pembagian kelompok sampel penelitian ini berdasarkan pada jumlah penduduk di setiap desa,

sehingga sampel yang di dapat setiap desa berdasarkan besar atau kecil jumlah penduduknya. Pembagian sampel setiap desa sebagai berikut:

$$\text{Desa Donotirto } \frac{6.306}{23.523} \times 100 = 26,8$$
$$= 27 \text{ responden}$$

$$\text{Desa Parangtritis } \frac{5.823}{23.523} \times 100 = 24,9$$
$$= 25 \text{ responden}$$

$$\text{Desa Tirtohargo } \frac{2.448}{23.523} \times 100 = 10,4$$
$$= 10 \text{ responden}$$

$$\text{Desa Tirtomulyo } \frac{5.380}{23.523} \times 100 = 22,9$$
$$= 23 \text{ responden}$$

$$\text{Desa Tirtosari } \frac{3.527}{23.523} \times 100 = 14,9$$
$$= 15 \text{ responden}$$

Berdasarkan perhitungan di atas $27 + 25 + 10 + 23 + 15 = 100$. Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang yang tersebar di 5 (lima) desa tersebut.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998:

91). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Daerah Kabupaten Bantul tahun 2010-2015 khususnya masyarakat Kecamatan Kretek. Data ini diperoleh secara langsung dari responden berupa jawaban yang berasal dari wawancara, pengamatan langsung (observasi), dan kuesioner yang telah disebar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 1998: 91). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari monografi Desa Donotirto, Parangtritis, Tirtosari, Tirtohargo, Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ), buku, jurnal, artikel, dan website resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Survei

Survei merupakan salah satu metode penelitian sosial yang sangat luas penggunaannya. Penelitian ini memiliki ciri khas yang ditunjukkan dari jumlah sampel cukup besar, dan cara pengumpulan datanya yang dilakukan

dengan menggunakan perangkat kuesioner (Wirawan, 2011: 41). Kuesioner merupakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung (melalui pos atau perantara) (Usman, 2008: 57).

Daftar pertanyaan dalam penelitian ini diajukan dengan jawaban tertutup, yaitu sudah disediakan jawabannya sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang telah disediakan dan memberi tanda pada jawaban yang menurut mereka sesuai dengan persepsinya. Responden yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Kretek. Kuesioner yang disebarakan adalah 100.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah *skala Likert*. *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala Likert*, maka variabel yang ada diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2003: 107).

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Usman, 2008: 55). Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih dalam dari responden sebagai pendukung data dari kuesioner. Wawancara ini ditujukan kepada masyarakat di Kecamatan Kretek. Dari 100 orang sampel, jumlah

narasumber dalam penelitian ini adalah 13% dari jumlah keseluruhan yaitu 13 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data. Dokumentasi dalam penelitian ini di dapat melalui buku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ), data monografi daerah yang diteliti, surat kabar, skripsi, artikel, jurnal, dan website resmi. Dokumen yang didapat tersebut digunakan untuk memperjelas dan mendukung data dari kuesioner dan wawancara.

d. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah melihat dengan penuh perhatian (Suyanto, 2005: 81). Fungsi dari observasi ini untuk mendapatkan informasi tambahan yang belum tercakup dalam kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Observasi perlu dilakukan untuk dapat mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat, dan melihat fenomena yang ada di masyarakat dengan jelas.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan oleh karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan

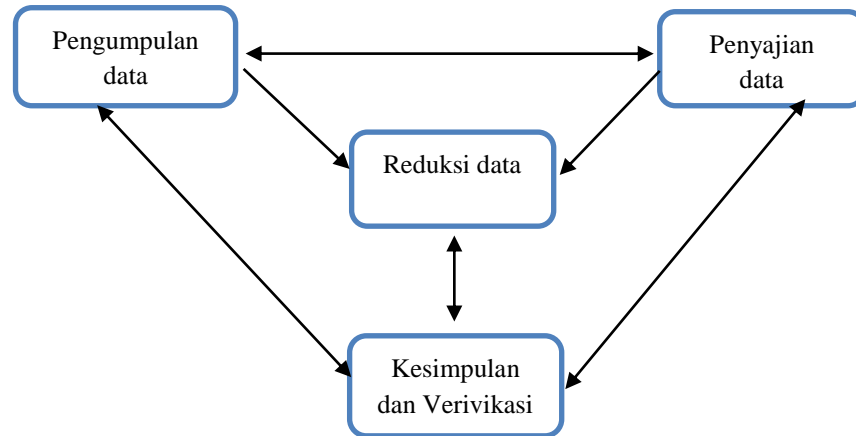
instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan (Sugiyono, 2005: 167-168).

Dalam penelitian ini yang diamati adalah keadaan di sekitar wilayah penelitian, mulai dari keadaan jalan, pasar, jembatan, sekolah, pelayanan dan sarana prasarana di Puskesmas, pelayanan di kantor kecamatan, dan kantor desa.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1992, dalam Moleong, 2012: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Gambar 1.1
Komponen Analisis Data Model Interaktif
(*Interactive Model*)



Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman
(1992, dalam Agus Salim, 2006: 22)

Proses-proses analisis kualitatif dapat dijelaskan ke dalam langkah berikut.

- a) Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b) Reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- c) Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tesusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.
- d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, dilakukan pencarian makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan,

mencatat keteraturan atau pola penjas dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dalam paradigma kuantitatif yaitu menggunakan skala indeks.

Sedangkan untuk menyimpulkan data yang diperoleh dari kuesioner menggunakan skala indeks. Indeks tersebut untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut (Suranto, 2006: 45-46) :

$$\text{Rumus Indeks : } I = \frac{1.F1+2.F2+3.F3+4.F4}{N}$$

Keterangan:

I : Indeks

F : Frekuensi sampel / sub sampel

N : Jumlah Sampel

1 : Kategori tidak baik

2 : Kategori kurang baik

3 : Kategori baik

4 : Kategori sangat baik

F1 : Tidak baik

F2 : Kurang baik

F3 : Baik

F4 : Sangat baik

Untuk perhitungan interval dari nilai-nilai indeks adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= \frac{\text{Nilai Tinggi}-\text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kriteria}} \\ &= \frac{4-1}{4} \\ &= 0,75\end{aligned}$$

Keterangan :

- 1,00 – 1,75 : Tidak baik
- 1,76 – 2,50 : Kurang baik
- 2,51 – 3,25 : Baik
- 3,26 – 4,00 : Sangat baik